

KONDISI DAN RENCANA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

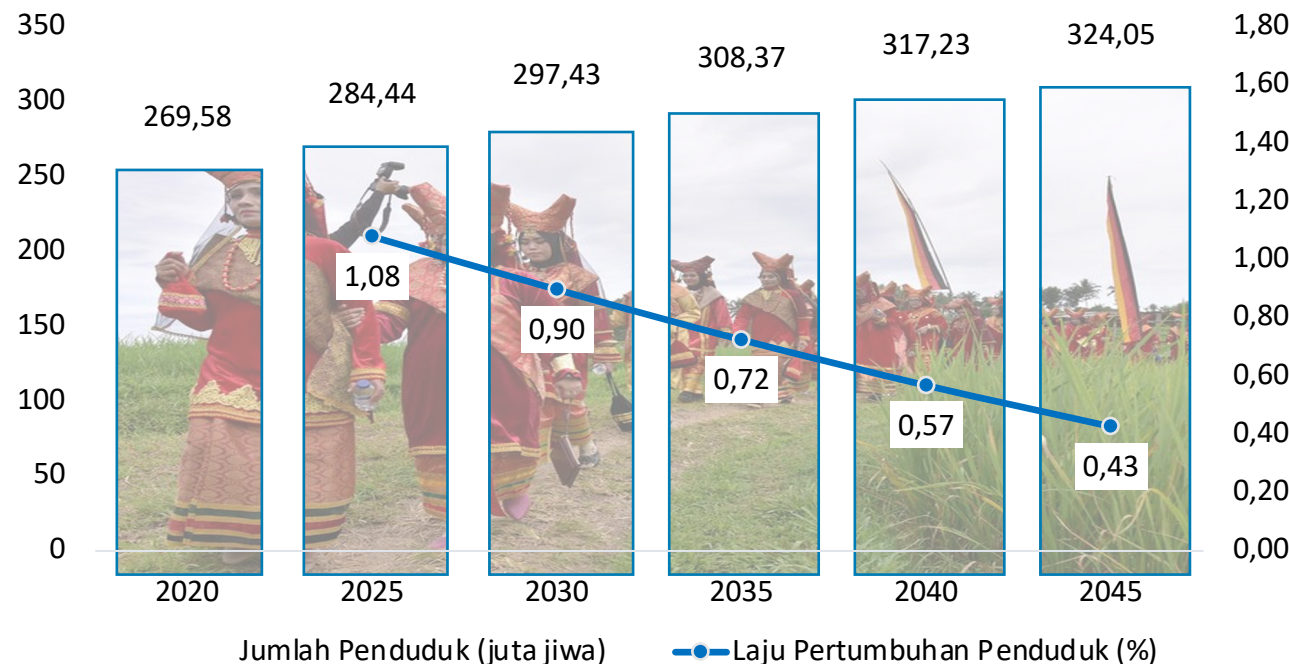
Selasa, 27 Agustus 2024

Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA
Perencana Ahli Utama
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Kementerian PPN/Bappenas



HASIL PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA DI MASA DEPAN

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk



1. Jumlah penduduk pada tahun 2045 sebanyak 324,05 juta, bertambah 54,48 juta orang dari 2020.
2. Laju pertumbuhan penduduk periode 2020–2045 terus melambat setiap tahunnya.
3. Pada periode tertentu rasio ketergantungan akan lebih rendah dari 50 persen yang mengindikasikan Indonesia memasuki periode **bonus demografi**.

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Badan Pusat Statistik



ACEH

2025 = 5.628.060 Jiwa
2045 = 6.867.942 Jiwa



SUMATERA SELATAN

2025 = 8.932.400 Jiwa
2045 = 10.454.595 Jiwa



SUMATERA UTARA

2025 = 15.796.152 Jiwa
2045 = 19.133.685 Jiwa



BENGKULU

2025 = 2.138.525 Jiwa
2045 = 2.569.207 Jiwa



SUMATERA BARAT

2025 = 5.917.035 Jiwa
2045 = 7.326.154 Jiwa



LAMPUNG

2025 = 9.525.554 Jiwa
2045 = 11.235.895 Jiwa



RIAU

2025 = 6.815.007 Jiwa
2045 = 8.320.222 Jiwa



KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2025 = 1.550.647 Jiwa
2045 = 1.859.474 Jiwa



JAMBI

2025 = 3.769.529 Jiwa
2045 = 4.482.193 Jiwa



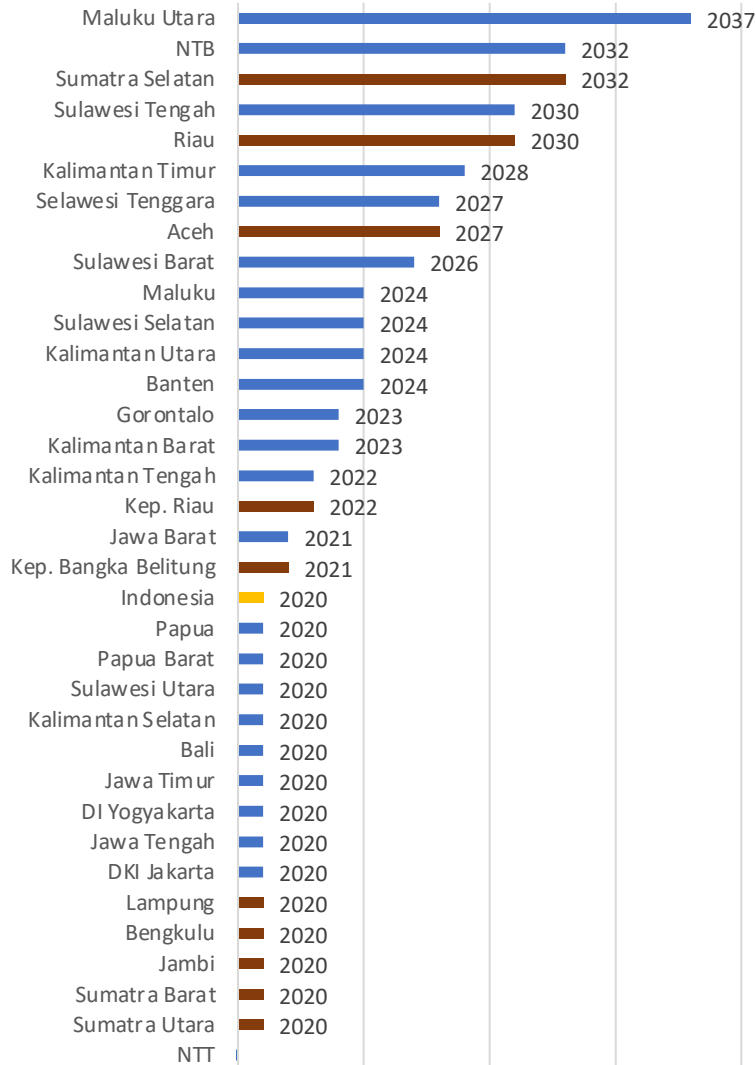
KEPULAUAN RIAU

2025 = 2.212.818 Jiwa
2045 = 2.705.440 Jiwa

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020–2050, di Pulau Sumatera penduduk paling banyak berada di Sumatera Utara dan penduduk paling sedikit ada di Kepulauan Bangka Belitung.

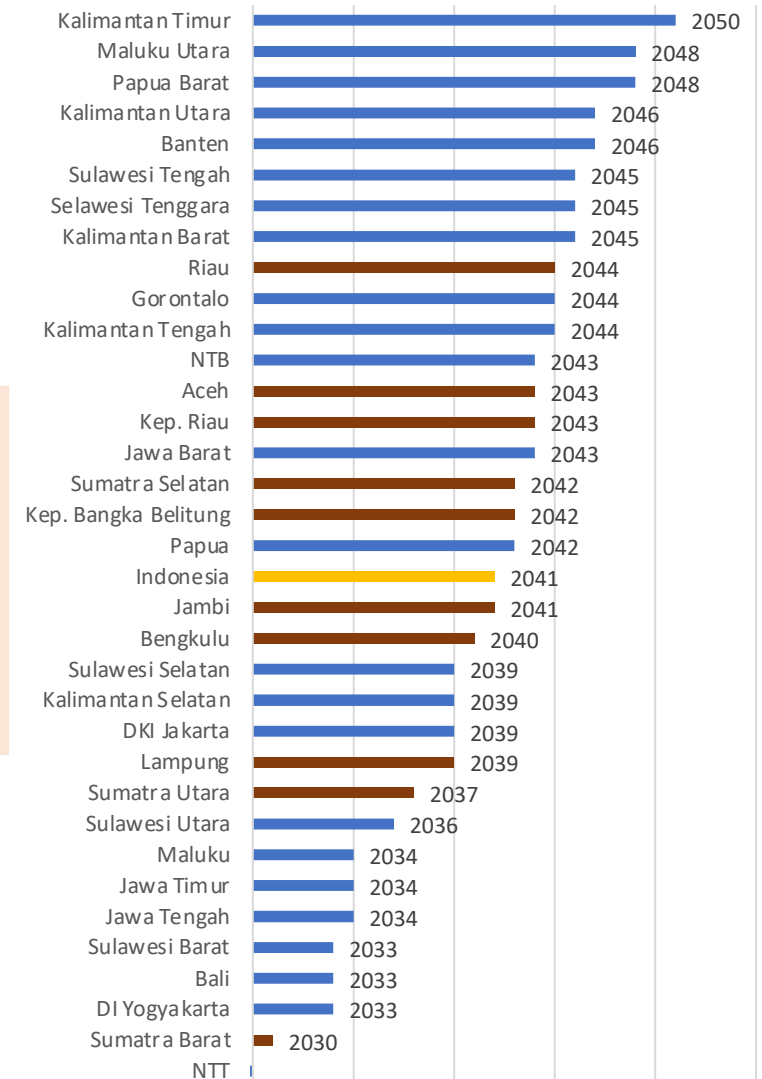
BONUS DEMOGRAFI DI WILAYAH SUMATERA

PUNCAK BONUS DEMOGRAFI TIAP PROVINSI



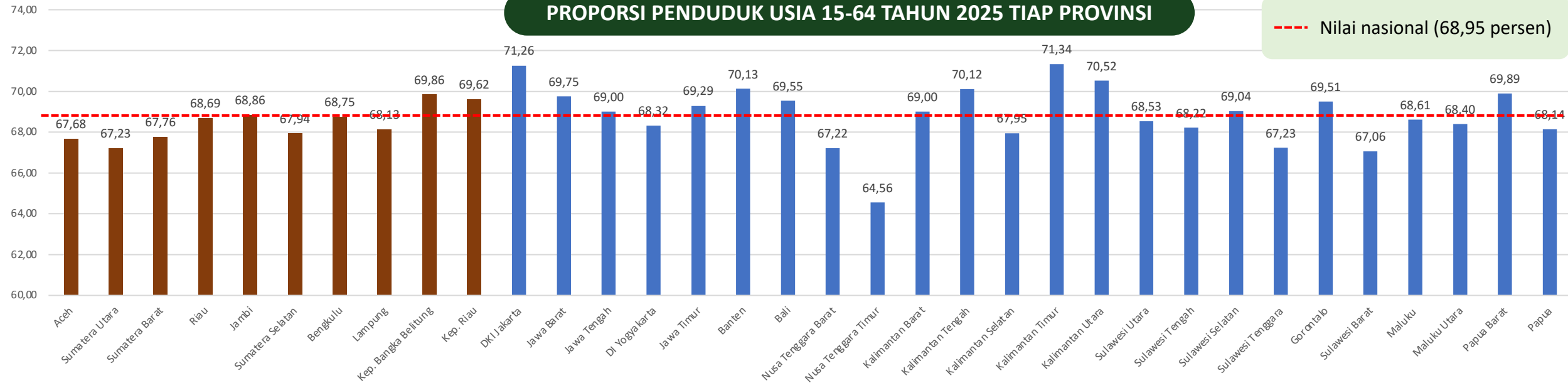
- Sesuai dengan variasi transisi demografi setiap provinsi, bonus demografi dan *aging population* bervariasi masing-masing provinsi.
- Puncak dan akhir bonus demografi masing-masing Provinsi berbeda-beda, sehingga diperlukan kebijakan khusus yang dapat memanfaatkan momen perbedaan perubahan tersebut.
- Hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera sudah memasuki **puncak bonus demografi**, hanya provinsi **Aceh, Riau dan Sumatera Selatan** yang belum memasuki **puncak bonus demografi**.
- Akhir puncak bonus demografi paling dekat terjadi di **Provinsi Sumatera Barat** yaitu tahun **2030** sedangkan provinsi lain berakhir di **tahun 2037 -2044**.
- Strategi yang komprehensif perlu dipersiapkan supaya manfaat **bonus demografi** dapat dirasakan secara optimal dan tercapainya **bonus demografi kedua**
- Perlu diperhatikan juga persiapan terkait menghadapi *aging population*.

AKHIR BONUS DEMOGRAFI TIAP PROVINSI



INDONESIA MEMASUKI MASA TRANSISI KEDUA

PROPORSI PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN 2025 TIAP PROVINSI



PROPORSI PENDUDUK USIA 65+ TAHUN 2025 TIAP PROVINSI



- Struktur penduduk Indonesia diproyeksikan akan di **dominasi** oleh **penduduk usia produktif (15-64 tahun)**. Dominasi penduduk usia produktif juga dialami oleh semua Provinsi dengan proporsi penduduk usia produktif diatas 60 persen **termasuk provinsi-provinsi di Pulau Sumatera**.
- **Dominasi penduduk usia produktif** ini harus segera dimanfaatkan **sebagai modal Pembangunan di masa depan**.
- **Seiring dengan penurunan TFR**, jumlah dan proporsi **penduduk usia produktif** akan **terus menurun** disertai **peningkatan proporsi penduduk lansia**.
- Ada **dua provinsi di Pulau Sumatera** yang sudah memasuki periode **aging population** (proporsi penduduk usia 65+ > 7 persen) yaitu **Sumatera Barat** dan **Lampung**.
- Jika **program-program** yang bersifat **population responsive** **dipersiapkan sejak dini**, maka **penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah** untuk pemerintah, melainkan akan **membantu perekonomian negara** atau **tercapainya bonus demografi kedua**.

OPTIMALISASI SILVER ECONOMY : MEMAKSIMALKAN PENDUDUK LANSIA

Mempersiapkan masa pensiun secara sosial dan ekonomi melalui perpanjangan usia pensiun untuk seluruh pekerja diperpanjang, dengan tetap mencegah crowding out dengan tenaga kerja muda, mempersiapkan sistem pension yang berkesinambungan.

Mengoptimalkan potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru dari lansia sebagai konsumen dan produsen (Silver Economy), salah satunya perluasan kesempatan kerja, berwirausaha, dan peningkatan kapasitas yang sesuai untuk tenaga kerja usia lanjut.

Menjaga pola konsumsi yang berkesinambungan: menghindari lonjakan pengeluaran kesehatan saat usia lanjut dan mengefektifkan investasi SDM ketika berusia muda.

Usia harapan hidup yang lebih panjang harus diiringi dengan upaya peningkatan usia harapan hidup sehat dan peningkatan produktivitas

Usia harapan hidup lebih Panjang menstimulasi tabungan dengan asumsi Perlindungan Sosial sudah mencakup benefit pensiun dan *Long Term Care* untuk sebagian besar penduduk lansia.

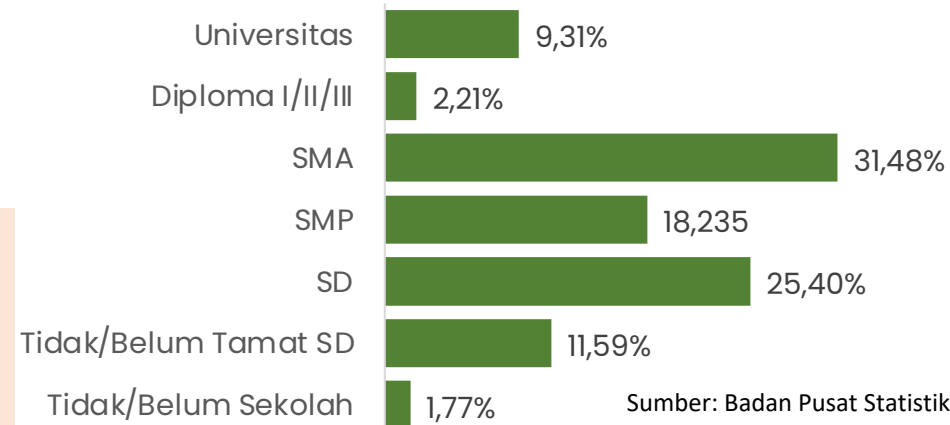
Struktur Ketenagakerjaan (% Total Tenaga Kerja)

	2005	2024
Pertanian	44,00	28,6
Manufaktur	12,7	15,1
Jasa-jasa	37,3	48,3
Lainnya	6,0	8,0

Struktur Ekonomi (% PDB)

	2005	2024
Pertanian	13,1	11,6
Manufaktur	27,4	29,7
Jasa-jasa	40,3	44,2
Lainnya	19,2	14,5

TINGKAT PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA



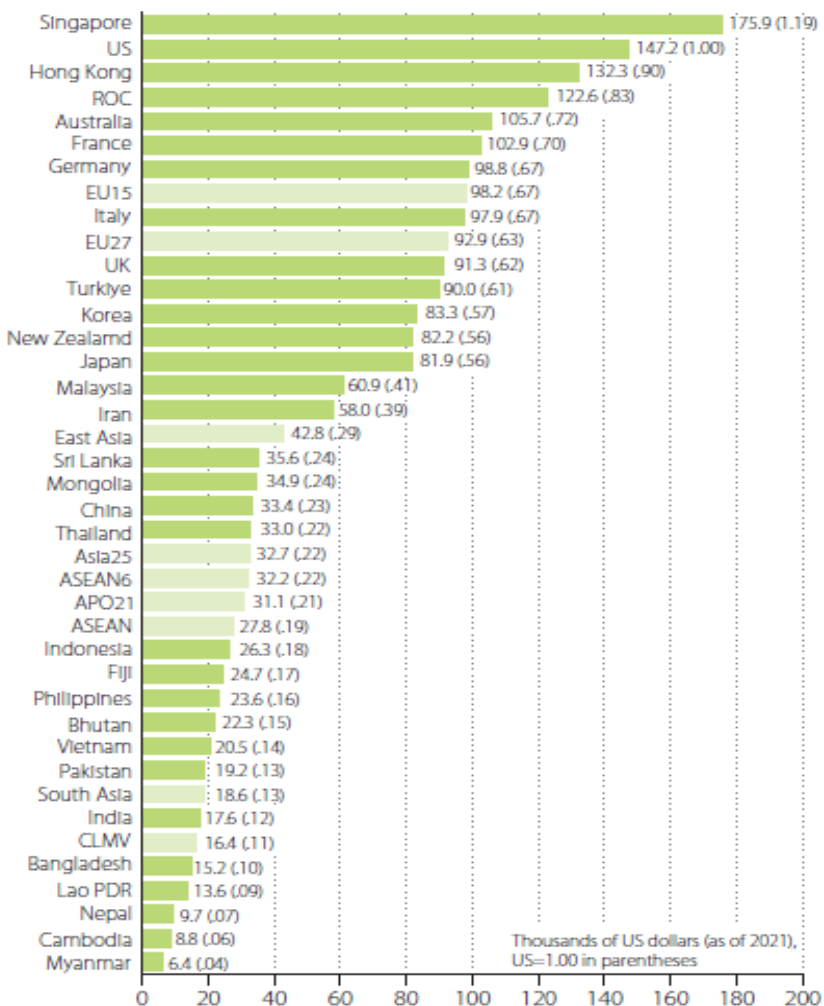
- **UMKM berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah.**
- UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 96,92 persen dan berkontribusi terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019.

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu:

1. Rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah);
2. Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan Pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
3. Informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik; dan
4. Pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, **struktur penduduk**, serta pola budaya kerja.

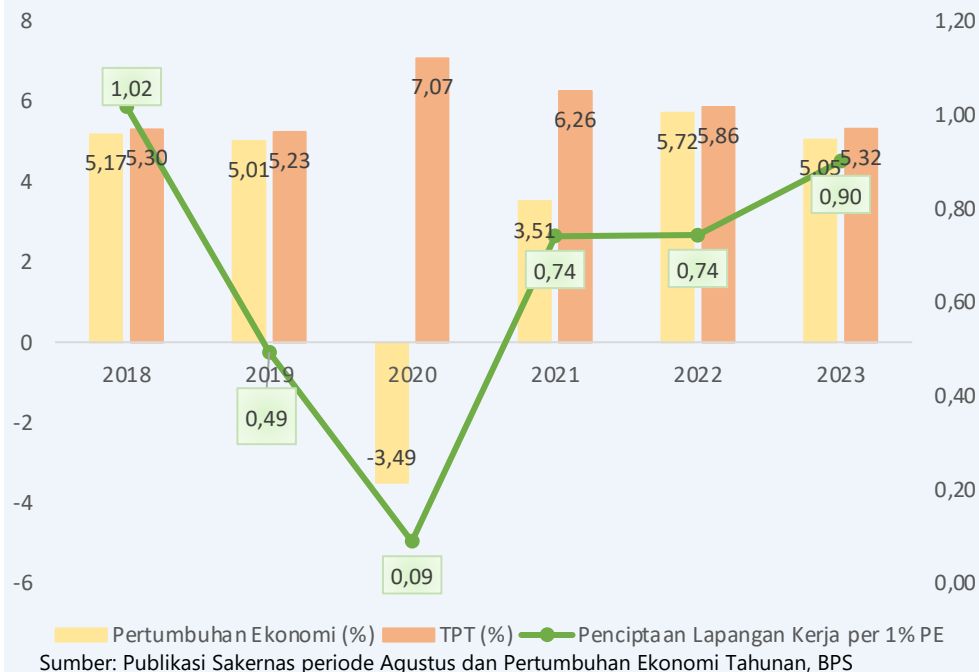
KONDISI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (1)

Tingkat Produktivitas Per Tenaga Kerja, 2021



Sumber: APO Productivity Databook 2023
Keterangan: PDB/tenaga kerja 2020, menggunakan PPP 2017

Penciptaan Lapangan Kerja Tidak Didorong oleh Pertumbuhan Ekonomi



- Jumlah penciptaan lapangan kerja 2020-2023: 10,42 juta (2020: -0,30 juta; 2021: 2,60 juta; 2022: 3,57 juta; 2023: 4,55 juta).
- Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja selama 2020-2023 sebesar 2,61%.
- Penciptaan kesempatan kerja terus didorong melalui: (1) Investasi padat pekerja di sektor bernilai tambah tinggi dan di sektor sumber pertumbuhan baru (pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital), (2) Penumbuhan kewirausahaan, (3) Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok.

Produktivitas Tenaga Kerja Belum Mendorong Pertumbuhan Ekonomi



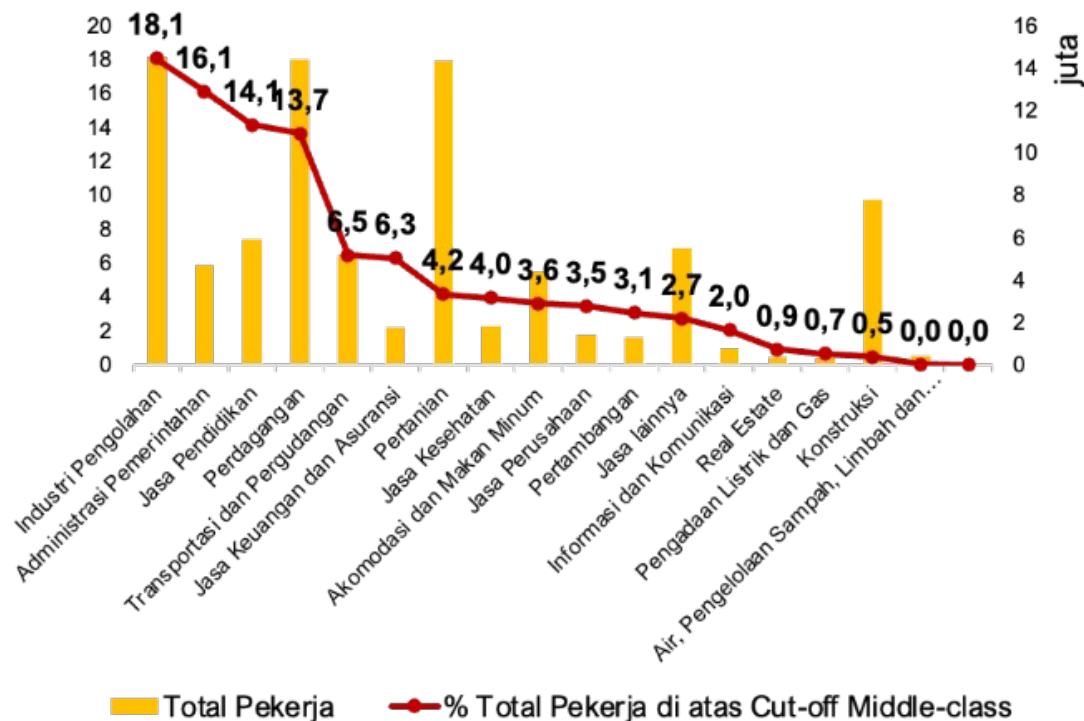
- Produktivitas per tenaga kerja Indonesia sebesar \$26.300 hanya sekitar 18% dari US dan masih di bawah rata-rata ASEAN
- Indonesia memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang saat ini sebagian besar masih berkeahlian rendah dan berpendidikan SMP ke bawah sehingga sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal dengan produktivitas rendah.
- Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas.

KONDISI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (2)

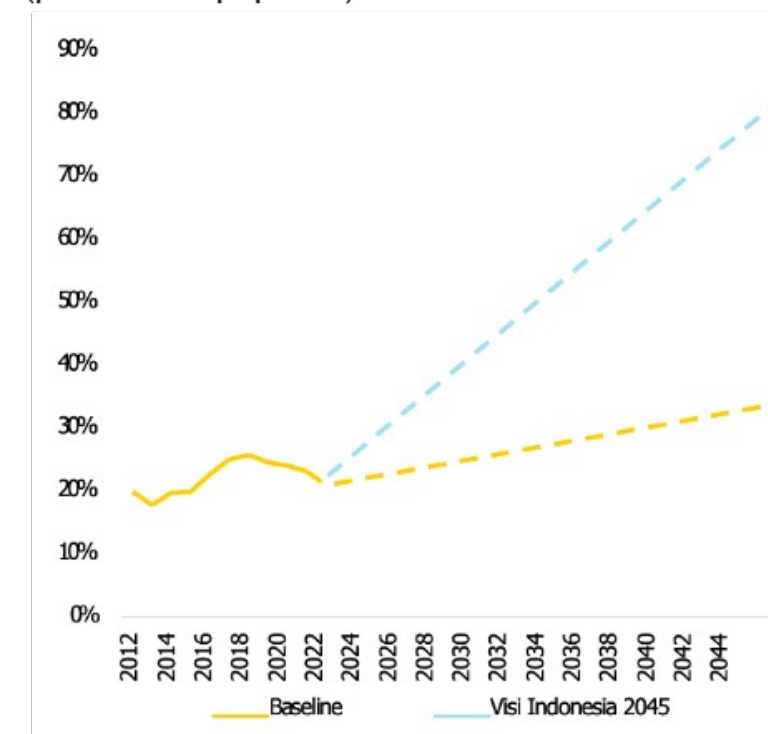
Kelompok Penduduk Kelas Menengah Menjadi Kunci Keberhasilan Transformasi Ekonomi

- Saat ini, kelompok pendapatan kelas menengah Indonesia hanya sebesar 18 persen. **80 persen populasi** harus menjadi kelas menengah agar Indonesia bisa keluar dari MIT.
- Konsekuensi: Lapangan kerja yang tersedia harus *middle-class jobs*, yaitu lapangan kerja dengan **pendapatan yang dapat menunjang kehidupan kelas menengah** bagi keluarga pekerja tersebut.

Total Pekerja dan Share Pekerja dengan Pendapatan di atas Batas *Middle-class Income*, 2018



Proyeksi Kelas Menengah Indonesia (persen dari populasi)



TANTANGAN



Penyesuaian pergeseran lapangan kerja ke arah informal dan kemunculan bentuk kerja baru (*gig worker*) yang bersifat sangat fleksibel.



Menciptakan pasar kerja yang fleksibel mengikuti perubahan lapangan kerja yang cepat.



Menciptakan tenaga kerja dengan keahlian tinggi (*high-skilled*) dan menengah (*semi-skilled*) yang sesuai kebutuhan pasar kerja.



Sistem pengembangan keahlian (*skills development system*) kita masih parsial dan belum berbasis kebutuhan pasar kerja.



Perlindungan pekerja masih parsial dan belum banyak menjangkau sektor informal.

ARAH KEBIJAKAN



Peningkatan produktivitas dan daya saing (*competitiveness*) tenaga kerja Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan ASEAN.



Pendidikan vokasi/kejuruan yang berfungsi menjawab tantangan permintaan tenaga kerja di industri.



Penciptaan lapangan kerja, akses terhadap pasar kerja luar negeri dan dalam negeri, serta jaminan perlindungan hak-hak pekerja termasuk pekerja migran Indonesia.



Pemanfaatan Sistem Informasi Pasar Kerja sebagai pusat informasi *demand* dan *supply* tenaga kerja.

TERIMA KASIH



**Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Kementerian PPN/Bappenas**

Menara Bappenas, Lantai 6
Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. B2,
DKI Jakarta 12920